

**PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN
KELOMPOK TANI DI DESA MAPPATOBA
KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE**



Oleh :

SUMIATI

45 08 021 030

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi
Administrasi Negara

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS " 45 " MAKASSAR
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar tersebut di bawah ini:

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone**

N a m a : **Sumiati**

Nomor Stambuk : **4508021030**

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah mengikuti Ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Negara (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar dan dinyatakan memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.

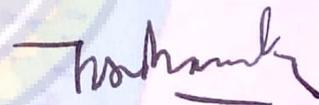
Makassar, 27 Juni 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dra. Hj. Juharni, M.Si.



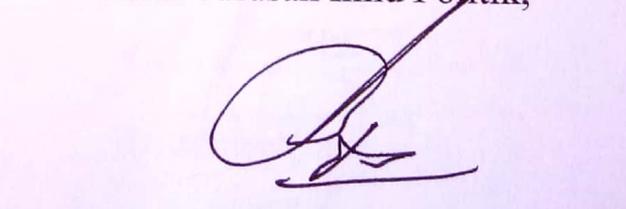
Dr. H. Husain Hamka, MS

Mengetahui;
Dekan FISIP. Universitas "45",



Dra. Hj. Juharni, M.Si.

Menyetujui;
Ketua Jurusan Ilmu Politik,



Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah akal dan pikiran yang membedakan kita sebagai makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini butuh tantangan dan kesabaran yang sangat besar dalam mendapatkan fakta yang riil di lapangan, namun penulis pun sadar bahwa apalah arti sebuah identitas mahasiswa yang di emban sampai sekarang walaupun tidak mampu untuk menciptakan ide dan kreatifitas dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan – perbaikan skripsi ini di masa mendatang.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Abd.Rahman,SH,MH Selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
2. Ibu Dra.Juharni,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar.
3. Bapak Drs.H.misbahuddin Ahmad,MS. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar.
4. Ibu Dra.Juharni,M.Si. Selaku pembimbing 1 atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs.Husain Hamka,M.Si. Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk terus mengoreksi dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Bapak /Ibu Dosen beserta Staff pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar, yang selama ini memberikan petunjuk dan nasehat serta ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Bapak Kepala Desa Mappatoba beserta staf yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan telah memberikan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua tercinta yang telah memelihara, membesarkan dan memberikan bantuan moril maupun material baik selama pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Dan kepada saudara – saudaraku tercinta (Abd.Rahman, Susi fatmawati dan Randi Aman Syukur, dan kakak iparku Mega) yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Buat Ahmad Hasriadi Kasnur yang selalu mendampingi dan memberikan masukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Buat Rekan – rekan Mahasiswa SOSPOL “45”Makassar terkhusus anak – anak POLITIK 08, juga seluruh adik – adik junior dan kakak – kakak senior yang masih betah di kampus, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam rangka penulisan skripsi ini hingga selesainya, penulis doakan semoga Allah SWT dapat membalas budi baik yang Bapak /Ibu/Saudara-saudari berikan kepada penulis dengan berlipat ganda dan mudah – mudahan skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, para pembaca dan masyarakat.

Makassar, 2 juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Teknik Analisa Data	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Program	15

B. Pelaksanaan Program	17
C. Pengertian Pengawasan	23
D. Pengertian evaluasi	24
E. Pengertian Kelompok Tani	25
E. Gambaran Umum Pelaksanaan Program PUAP	27
1. Tujuan PUAP	32
2. Sasaran PUAP	32
3. Sosialisasi PUAP	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis	37
B. Keadaan Demografis	38
C. Potensi Wilayah	39
D. Struktur Organisasi	40
E. Komposisi Pegawai	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Program PUAP	45
B. Dampak PUAP Terhadap Kelompok Tani	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
2. Keadaan Penduduk Dilihat Dari Pendidikan	39
3. Jumlah Pegawai Kantor Desa Mappatoba Berdasarkan Jabatan	43
4. Komposisi pegawai kantor desa mappatoba menurut jenis kelamin	44
5. Penilaian Responden Terhadap pelaksanaan sosialisasi PUAP	48
6. Penilaian Responden Tentang pelaksanaan penyaluran dana PUAP ...	53
7. Penilaian Responden Terhadap pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan program PUAP	54
8. Tanggapan Responden terhadap evaluasi pelaksanaan program PUAP	55
9. Tanggapan Responden Terhadap dampak pemanfaatan dana bantuan kelompok tani	58
10. Penilaian Responden Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Bantuan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka konseptual	10
Gambar 2 : Struktur Organisasi Desa Mappatoba	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih menghadapi permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, politik maupun bidang-bidang lainnya. Beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh bergesernya pembangunan sektor pertanian ke sektor industri.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah pokok yang harus segera diselesaikan dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa. Sekitar 20,65 juta jiwa dari jumlah tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Ini membuktikan bahwa desa masih menjadi pusat kemiskinan. Dilihat dari sisi mata pencaharian penduduk desa, dapat dikatakan kemiskinan mayoritas terjadi pada penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Hal ini selaras dengan pernyataan Menteri Pertanian pada suatu kesempatan bahwa 70 persen masyarakat miskin Indonesia adalah petani, terutama buruh tani yang jumlahnya sangat besar dan memang rawan terhadap kemiskinan. Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Beberapa masalah pertanian yang dimaksud yaitu :

pertama, sebagian besar petani Indonesia sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Tidak sedikit petani yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan ruang gerak petani terhadap fasilitas yang dimiliki sehingga membuat petani menjadi tertutup dan lambat dalam merespon perubahan yang terjadi di dunia luar.

Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi pertanian. Adanya penguasaan informasi oleh sebagian kecil pelaku pasar komoditas pertanian menjadikan petani semakin tersudut. Terlihat dari realitas ketidaktahuan petani akan adanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan pembelian oleh oknum terhadap hasil pertanian dibawah harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit dari petani yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil pertaniannya bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar petani Indonesia tidak mengandalkan dari sektor pertanian, tetapi dari luar sektor pertanian seperti kerja sampingan buruh pabrik, kuli bangunan dan lain sebagainya.

Ketiga, petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terlihat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki petani. Ini terjadi karena masih adanya stigma atau pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa menjadi petani adalah karena pilihan terakhir dikarenakan tidak memperoleh tempat di sektor lain. Faktor penyebab lainnya adalah pemerintah yang berpihak pada sektor industri dari pada sektor pertanian yang berdampak pada semakin menyempitnya lahan yang dimiliki oleh petani akibat konversi lahan menjadi lahan industri maupun pemukiman.

Keempat, masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Masalah modal tersebut diantaranya adalah sebagian besar petani mengalami kekurangan modal untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, belum adanya asuransi pertanian, masih adanya praktek sistem ijon dan sistem perbankan yang kurang peduli kepada petani.

Pertanian memiliki fungsi dan peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Pertanian tidak sekedar menghasilkan bahan pangan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini, makna pertanian tidak hanya mencakup pada aspek produksi usaha tani (on-farm) semata, tetapi juga mencakup kegiatan luar usaha tani yang terkait dengan produksi, baik yang berada di hulu maupun di hilir (off-farm), serta aktivitas penunjang yang

mendukung penuh seluruh kegiatan pertanian. Namun, ketika berbicara tentang petani, maknanya tidak lepas dari kegiatan produksi usaha tani, karena sebagian besar petani kita masih berkuat pada on-farm, yang bertujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, serta energi.

Melihat tingkat pendapatan petani yang relatif lebih rendah daripada para pelaku sektor ekonomi lainnya, akibatnya tingkat kemiskinan di sektor ini masih relatif tinggi. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian, yaitu rendahnya kepemilikan dan penguasaan lahan, rendahnya produktivitas usaha tani, rendahnya harga produk di tingkat petani, rendahnya pendidikan dan keterampilan petani, serta minimnya akses petani terhadap sumber pembiayaan (permodalan).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sumber permodalan usaha tani para petani didapatkan dari modal sendiri yang relatif pas-pasan, meminjam dana dari para tengkulak dan atau lembaga keuangan informal lainnya yang beroperasi di wilayah pedesaan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di pedesaan, Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007, Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM

Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Namun pada tahun 2008 mengalami pergantian nama yaitu menjadi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri.

Pemanfaatan dana PUAP dialokasikan untuk pembelian sarana produksi kegiatan pertanian yang meliputi pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya serta juga digunakan untuk simpan pinjam. Namun pemanfaatan dana tersebut dikhawatirkan digunakan oleh petani tidak pada tempatnya atau terjadi penyimpangan penggunaan dana tersebut. Adanya isu mengenai penyimpangan dana PUAP dikarenakan pandangan para petani bahwa program BLM-PUAP merupakan program bagi-bagi uang.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu evaluasi mengenai pemanfaatan dana PUAP yang disalurkan melalui Gapoktan serta pengaruh program PUAP tersebut terhadap pendapatan petani. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menilai apakah pelaksanaan program baru ini memberikan dampak positif baik dalam penyalurannya maupun dalam penggunaan dana tersebut. Evaluasi mengenai pemanfaatan dana PUAP dapat dikaji dari pencapaian sasaran dan pemanfaatan dana tersebut.

Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dari sisi dampak program PUAP. Penilaian keberhasilan program ini didasarkan pada indikator yang ada, salah satunya adalah dengan melihat tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya program PUAP. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian ditarik kesimpulan secara keseluruhan dan kemudian direkomendasikan saran perbaikan bagi pelaksanaan program PUAP kedepannya.

Kehadiran program PUAP diharapkan bisa mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi petani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan dan identifikasi masalah, penulis merumuskan pertanyaan penelitan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program PUAP di desa mappatoba kecamatan salomekko?
2. Bagaimana dampak program PUAP terhadap kelompok tani di desa mappatoba kecamatan salomekko?

C. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PUAP di desa mappatoba kecamatan salomekko.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan program PUAP terhadap kelompok tani di desa mappatoba kecamatan salomekko.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi akademik atau aspek keilmuan : diharapkan penelitian ini berguna bagi pembangunan, pemahaman, penalaran dan pengalaman dalam mengembangkan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dana bantuan kelompok tani dalam penanggulangan kemiskinan yang berada di pedesaan.
- b. Kegunaan praktis , dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi, masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah Bone.
- c. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Selama ini, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran baik yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ataupun oleh pemerintah daerah cenderung satu dengan yang lainnya tidak terkait, sehingga masih ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kesenjangan pelaksanaan program antara

satu daerah dengan daerah lainnya. Banyak dana yang telah digunakan untuk memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan, tetapi hasilnya masih belum bisa dikatakan berhasil. Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun.

Belum berhasilnya penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan dikarenakan selama ini masyarakat miskin dan pengangguran hanya dijadikan objek bukan sebagai pelaku utama. Seharusnya masyarakat miskin ditingkatkan kemampuannya agar dapat menjadi modal sosial untuk kemudian diberdayakan dan ditingkatkan kemandiriannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik dari pada yang dilaksanakan oleh proyek seperti biasa.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk melihat keberhasilan program dana bantuan-PUAP yaitu dengan mengukur dan menilai dampak dari program PUAP serta peranannya dalam meningkatkan pendapatan usaha pertanian hingga pada akhirnya mampu mensejahterakan para petani di perdesaan. Pengelolaan dan pencapaian tujuan dari program PUAP (peningkatan pendapatan usaha) juga dipengaruhi oleh karakteristik Gapoktan sebagai pelaksana program .

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai atau berhasil berdasarkan indikator -

indikator yang ada. Keberhasilan program PUAP akan memberikan dampak berupa manfaat yang optimal dan oleh karena itu evaluasi pelaksanaan program ini sangat diperlukan untuk menilai indikator-indikator keberhasilan PUAP antara lain:

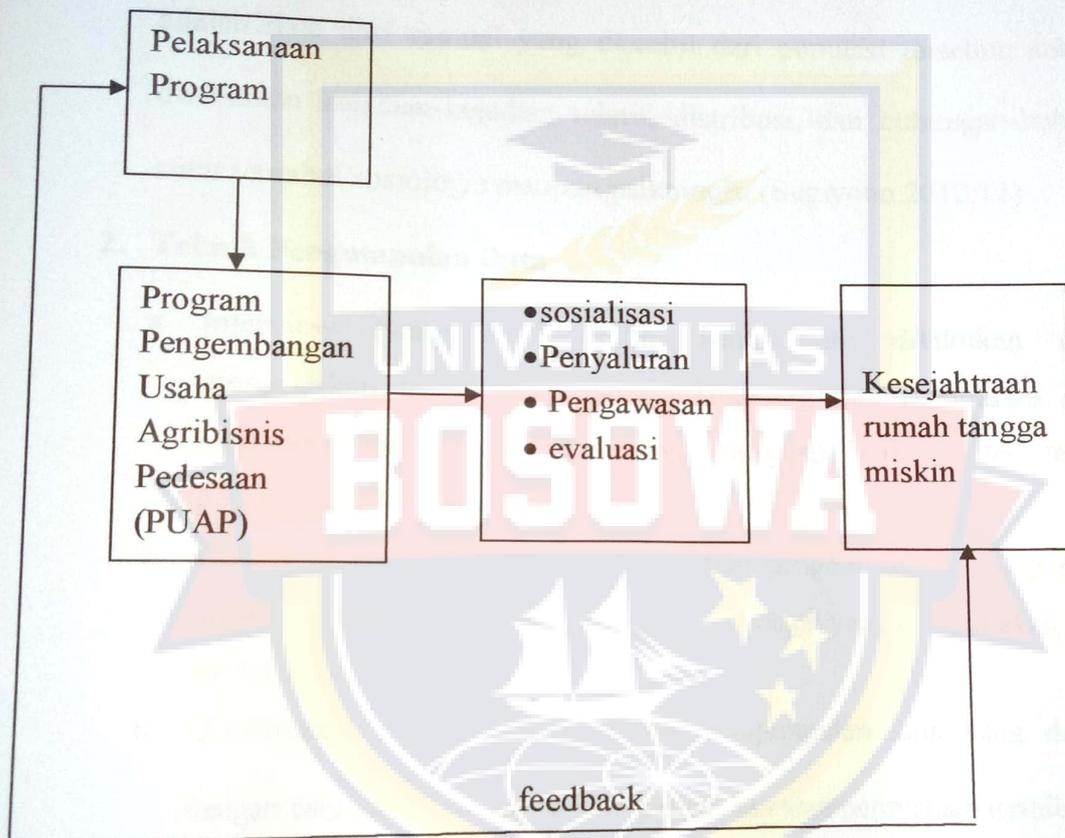
- a. Tersalurkannya BLM – PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian.
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.
- c. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menilai keberhasilan program PUAP, akan digunakan salah satu indikator yang dianggap bias mewakili keberhasilan program tersebut. Indikator yang dimaksud adalah menilai tingkat pendapatan. Pemilihan indikator ini dengan pertimbangan bahwa pendapatan merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran.

Pada dasarnya program dana bantuan kelompok tani apakah dirasakan efektif atau belum oleh masyarakat, sehingga disinilah akan dilihat seberapa baik Program dana bantuan kelompok tani dan bagaimana dampaknya sehingga

kurang Efektif program tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Skema sebagai berikut :

Gambar I
Kerangka Konseptual



F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

- a. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, dimana metode deskriptif ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri baik satu variable atau

lebih tanpa membuat perbandingan tetapi membentuk gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

- b. Dasar penelitian ini adalah melakukan survei dimana penelitian yang dilakukan pada populasi besar ataupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. (Sugiyono 2010:11).

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), yaitu Tehnik ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden atau narasumber yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu kegiatan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga gambaran objek yang didapat akan menjadi lebih konkret.
- c. Questioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di desa mappatoba kec. Salomekko yang terdiri dari 8 kelompok tani dan anggotanya berjumlah 200 orang, sehingga populasi berjumlah 200 orang.

b. Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang dilakukan adalah *Purposive Sampling* yang ditetapkan secara sengaja sebanyak beberapa orang dan dianggap dapat memberikan data atau informasi secara jelas. Yang menjadi sampel pada saat pengumpulan data yaitu, kelompok tani sebanyak 45 Orang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ketua GAPOKTAN sebanyak 1 orang dan pegawai kantor desa sebanyak 2 orang.

4. Teknik Analisa Data

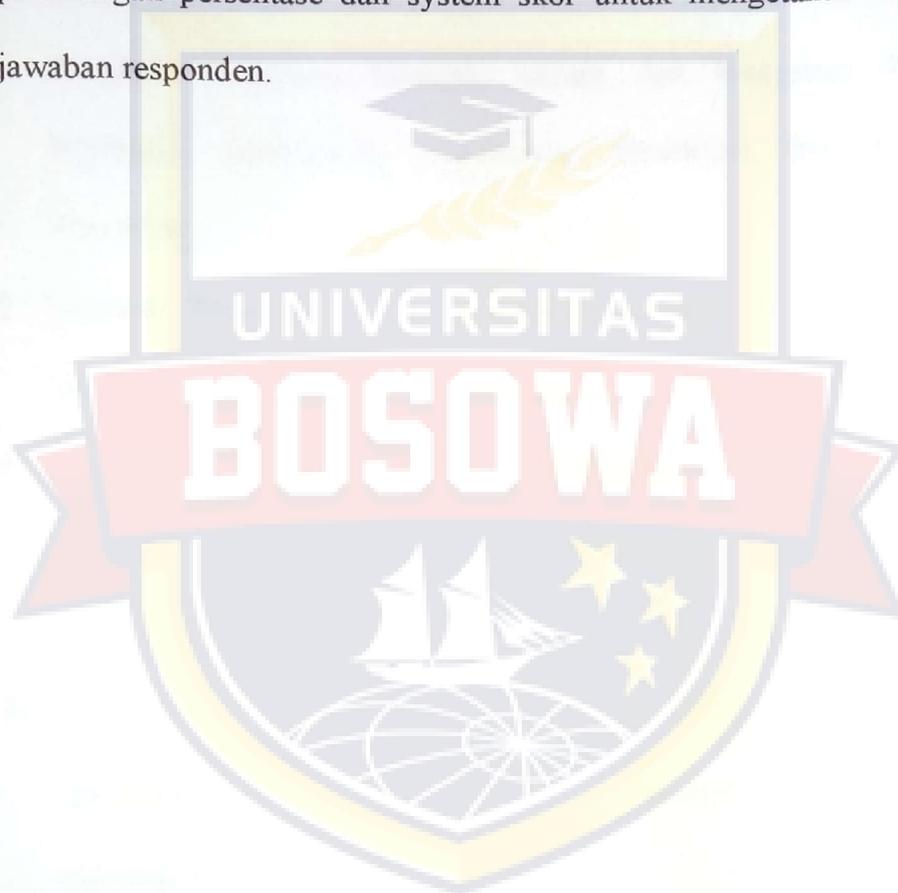
Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya didatabulasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi. Hasil analisisnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap program dana bantuan-PUAP.

Persepsi Masyarakat akan diukur dengan menggunakan skala Likert. Jawaban atas setiap pertanyaan ditentukan berdasarkan urutan pola jawaban 1,2,3,4 dan 5 dengan asumsi bahwa :

- **Jawaban Sangat Baik diberi skor 5**
- **Jawaban Baik dberi skor 4**
- **Jawaban Tidak baik diberi skor 3**
- **Jawaban Kurang baik diberi skor 2**

➤ **Jawaban Sangat tidak baik diberi skor 1**

Terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner selanjutnya dipastikan jawaban responden berdasarkan total skor masing – masing jawaban. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis deskriptif melalui perhitungan persentase dan system skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup dan penjelasan skripsi ini, maka penulis menampilkan sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bab.

Bab I, menguraikan pendahuluan yang di dalamnya berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang defenisi dan konsep pelaksanaan dan pengertian – pengertian yang berkaitan tentang judul.

Bab III, menguraikan Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan Keadaan Geografis, Keadaan Demografi, Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai.

Bab IV, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan penyaluran dan dampak program dana bantuan-PUAP kelompok tani.

Bab V, sebagai bab yang terakhir menguraikan tentang penutup, yakni di dalamnya terdapat kesimpulan dari isi skripsi serta juga memuat beberapa saran – saran atau usul yang dianggap bisa membangun.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat beberapa aspek. Menurut Rumbino (2003:26) dikutip dari skripsi Rizky Amalia mengemukakan bahwa: “Program atau proyek adalah salah satu keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat (Benefit) atau suatu kegiatan dengan pengeluaran biaya dan harapan untuk memperoleh hasil pada waktu yang akan datang dan yang dapat direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan sebagai suatu unit”.

Syukur Abdullah (1983:17) dalam bukunya “Bunga Rampai Administrasi” memberikan definisi sebagai berikut: “Program adalah merupakan rangkaian pola tindakan yang tersusun secara konsisten dan logis, sehingga dengan demikikian agar mencapai tujuan dari program yang tersusun tersebut”.

Sedangkan menurut Solihin Abdul Wahab (1997:17) mengemukakan bahwa: “Program adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang pengesahan, pengorganisasian, pengurusan adalah penyediaan sumber-sumber yang diperlukan”.

Dari bertitik tolak dari definisi program yang dikemukakan tersebut diatas, maka jelas bahwa program adalah merupakan suatu pedoman dasar dalam melakukan suatu aktivitas – aktivitas untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam mencapai tujuan suatu program harus memberikan gambaran yang jelas dan rinci. Diakui bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu program tidaklah mudah, karena adanya faktor yang saling mempengaruhi. dengan adanya fokus – fokus yang dapat memengaruhi baik itu mendukung, maupun menghambat, amak perlu diketahui bagaimana suatu program yang dianggap baik. Bintoro Tjokroamindjojo (1996:181) memeberikan criteria sebuah program yang baik sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
- b. Penentuan peralatan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek –proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan biaya yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha dan program lainnya, suatu program tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

B. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan rangkaian tindak lanjut (setelah sebuah program ditetapkan) yang terdiri dari pengambilan keputusan langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program menjadi kenyataan agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program menurut Syukur Abdullah dalam bukunya Bunga Rampai Administrasi (1987: 401) sekurang- kurangnya terdapat tiga unsur yang terdapat dalam pelaksanaan program 1) Adanya program, 2) Adanya target group atau sasaran dalam hal ini ialah masyarakat yang diharapkan menerima manfaat program itu, 3) Adanya implementer atau pelaksana program itu, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.

Jika menginginkan pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu acuan atau pedoman berupa program kerja atas apa yang menjadi objek kegiatan yang didalamnya mencerminkan visi dan misi, metode pelaksanaan, serta sasaran yang hendak dicapai dari visi dan misi. Dimana ketiga variabel dapat berjalan jika faktor internal dan eksternal dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat program.

Faktor internal mencakup kemampuan dan kelemahan yang tersedia serta anggaran yang cukup, sedangkan faktor eksternal mencakup volume kegiatan, waktu yang digunakan, biaya yang kedua faktor ini dimaksudkan agar

pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan efisien termasuk didalamnya partisipasi masyarakat.

1. Manajemen

Manajemen sebagai bentuk proses tindakan perlakuan terhadap semua kegiatan yang terlibat dalam kegiatan untuk bekerja sama dan saling terkait untuk mencapai tujuan dengan fungsi-fungsinya yaitu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi, maka program yang telah disusun oleh manajemen akan bertindak melalui fungsi-fungsinya guna mencapai sasaran yang hendak dicapai.

Jadi terlibatnya manajemen dalam program mengarah kepada terciptanya pelaksanaan sesuai yang direncanakan sekaligus restrukturisasi program itu sendiri melalui evaluasi, sehingga yang diinginkan dari manajemen tidak semata-mata pemberdayaan kemampuan dan hasil dalam melaksanakan kegiatan, tetapi bagaimana pelaksanaan dan hasil yang dicapai secara efektif dan efisien yang berarti ikut diperhitungkan masalah pengorbanan baik tenaga kerja yang digunakan maupun biaya.

Menurut F.X Soedjadi (1994:3) mendefinisikan manajemen sebagai: “suatu proses kegiatan dari seorang pemimpin yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama manusia sebagai sumber tenaga kerja dengan pemanfaatan sumber-sumber lain serta waktu tersedia untuk itu dengan cara-cara yang setepat-tepatnya”.

Sedangkan menurut Dorothea Wahyu Ariani (2003:21) mengatakan bahwa: "Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya".

Dari uraian diatas nampak bahwasannya manajemen berfungsi menciptakan ruang lingkup suatu sistem terhadap program yang orientasinya bertumpu pada kemampuan baik sumber daya manusia maupun dana dengan besarnya nilai yang akan dicapai sebagai sasaran.

2. Faktor Pendukung Terhadap Program

Guna menciptakan pembauran antara pemerintahan dengan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang membentuk kekuatan dalam memerangi masalah kemiskinan maka ada tiga faktor pendukung yang sangat penting yaitu :

a. Kepemimpinan

Menurut W. Djefri Dana (1990: 21) "Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formil yang mempunyai integritas dan pemimpin informal yang ,mempunyai atau memiliki legitimasi". Ini berarti bahwa di dalam menggalakkan program dana bantuan diperlukan orang-orang yang mampu menjabarkan program-program dan sekaligus mampu menciptakan suasana mempersatukan persepsi dan tindakan antar pemerintah dan masyarakat, sehingga dengan cara ini program akan berjalan dengan baik, oleh karena kedua pemimpin yang dimaksud punya

legalitas dan legitimasi baik terhadap Negara maupun masyarakat secara khusus sebagai objek program.

b. Komunikasi

Begitu pentingnya komunikasi sebagai media atau alat informasi bagi pemerintah, bagi masyarakat utamanya masalah pembangunan diungkapkan oleh M. Dermawan Kaharjo, dkk yang dikutip dari W. Djefri Dana (1990: 21) mengatakan bahwa: "Supaya masyarakat dapat terlibat dalam suatu sistem dan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, hendaklah administrasi pemerintah menjangkau golongan masyarakat yang paling jauh dan paling perlu bagi berhasilnya usaha pembangunan".

Ungkapan yang dikemukakan diatas, terlihat jelas yang dimaksud adalah komunikasi, dimana program yang telah dihasilkan perlu di informasikan pada lokasi yang akan dituju, sehingga sebelum program berlangsung jauh sebelumnya masyarakat sudah menerima informasi, utamanya bagi pemimpin informal yang berada pada lokasi yang akan di programkan. Namun perlu diingatkan bahwa komunikasi tidak selalu bersumber dari atas melainkan harus bersifat timbal balik (dua arah), sehingga konsep dasar yang melatar belakangi program juga bersumber dari masyarakat melalui pemimpin informal yang mewakilinya dan secara ini lebih efektif dilakukan oleh karena program kerja yang ditawarkan sejalan dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Untuk itu komunikasi juga bertujuan untuk mengembangkan suatu iklim yang mengurangi tekanan dan konflik dalam masyarakat, karena secara enfris

salah satu penyebab terjadi konflik aksi atau konflik dalam masyarakat, karena adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan sebagian masyarakat, misalnya ada orang-orang yang kurang simpatik dimata masyarakat mempunyai kedudukan potensial dalam pelaksanaan pembangunan atau mungkin juga ada program kerja yang tidak sama sekali melibatkan warga masyarakat, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan.

c. Pendidikan

Pendidikan juga merupakan unsur yang paling penting bagi terlaksananya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan atau dalam program pemerintah, karena menyangkut masalah tingkat pengetahuan untuk memahami sesuatu, sehingga dalam proses pembangunan perlu diperhatikan adanya pemberian pendidikan nonformil berupa pelatihan dan pendidikan masyarakat dengan sasaran pada kemampuan dan keterampilan agar partisipasi yang diperlihatkan masyarakat berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat di desa adalah masyarakat pedalaman, maka mau tidak mau pemerintah harus memperhatikan faktor pendidikan pada masyarakat dimana objek pembangunan yang akan dilakukan jika menginginkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat kemudian dengan pendidikan juga mendukung masalah kepemimpinan dan komunikasi, sehingga komunikasi dua arah yang menjadi pokok utama mendasar program seperti yang dimaksudkan diatas dapat terwujud.

Jika diperhatikan ketiga faktor penting tersebut yang sehubungan dengan pelaksanaan program dana bantuan sangat beralasan dan rasional, oleh karena masalah kemiskinan adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut yang disertai dengan ketiga faktor yang dijelaskan tadi dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Santoso Sastro Putro (1988:13) bahwa untuk menciptakan partisipasi masyarakat secara efektif harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. Perlunya waktu sebelum berlangsungnya suatu kegiatan.
- b. Subjek partisipasi harus relevan dengan kepentingan masyarakat.
- c. Orang-orang yang berpartisipasi perlu berhubungan secara timbal balik dengan bahasanya sendiri yang bisa dimengerti untuk saling tukar pikiran.
- d. Orang-orang yang berpartisipasi harus mempunyai kemampuan berupa keterampilan.
- e. Tidak ada salah satu pihak merasa terpaksa melakukan suatu kegiatan atas tekanan dari pihak tertentu.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Santoso Sastro Putro nampak bahwasanya partisipasi efektif apabila menyangkut empat hal, pertama masalah waktu, program sesuai kepentingan masyarakat, komunikasi yang saling terbuka, serta kemampuan yang dimiliki masyarakat, sehingga dikaitkan dengan unsur-unsur penting didalam melaksanakan proses pembangunan khususnya masalah

kemiskinan yang telah dijelaskan akan nampak kesamaan pada segi kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan.

C. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan untuk mengadakan pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan agar benar – benar mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu rencana. Jadi dengan demikian pengawasan itu tidak hanya mencari kesalahan semata – mata, tetapi lebih ditujukan untuk membantu kelancaran dan suksesnya pelaksanaan dan tidak memacetkan pelaksanaan.

S.P Siagian (1994 : 39) memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut : “ pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut J.Wajong (1990 : 62) bahwa : “pengawasan adalah meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan sector publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah – langkah pembehan atau koreksi”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak mungkin dilaksanakannya tidak ada pedoman untuk melakukannya. Tanpa adanya pengawasan akan menimbulkan penyimpangan tersebut, sehingga keputusan yang telah dibuat benar – benar dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika pengawasan tidak dilaksanakan kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan

yang pada akhirnya akan terjadi penyimpangan tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

D. Pengertian Evaluasi

Evaluasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha penelitian terhadap suatu jenis kegiatan hal sesuai apa yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa : evaluasi adalah penilaian. Melalui penilaian tersebut akan diketahui apakah kegiatan yang dilakukan mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa suatu program yang dilaksanakan belum mencapai tujuan, maka secara otomatis melalui evaluasi akan diketahui pula faktor – faktor yang menyebabkan kegagalan suatu kegiatan atau program. Demikian melalui evaluasi dapat dicari jalan keluar sebagai alternatif pemecahan masalah, sehingga suatu kegiatan atau program dapat mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki.

Penilaian adalah kegiatan untuk memeriksa apakah tujuan program tercapai sesuai rencana. Sebaliknya evaluasi juga mencakup kelompok sasaran masyarakat sekitarnya dan lingkungannya. Lebih pula dijelaskan bahwa fungsi evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Mendaftar kekuatan dan kelemahan dari program yang direncanakan dan dilaksanakan.

2. Memberikan bukti – bukti nyata apakah program berhasil atau belum seluruhnya dilaksanakan selain itu juga memberikan gambaran mengenai dampak suatu program terhadap kelompok sasaran masyarakat sekitar dan lingkungannya.
3. Menilai penggunaan biaya yang efektif sesuai rencana program.
4. Informasi data yang masuk dari hasil pemantauan dan penilaian sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam langkah berikutnya.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengertian evaluasi, maka berikut ini akan diberikan pengertian evaluasi dari berbagai ahli sebagai berikut :

Menurut Siagian S.P. (1994:64) bahwa : “evaluasi adalah kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga merupakan studi yang mengkombinasikan penampilan dengan suatu nilai tertentu”.

Sedangkan menurut Musanef (1993:21) bahwa : “evaluasi adalah pengukuran atau penilaian formal dan penilaian instiutif mengenai kemajuan suatu pekerjaan”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kegiatan pekerjaan atau untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu pekerjaan dilakukan seseorang.

E. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan dan kebersamaan dalam kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), serta kesepakatan dalam meningkatkan usaha pertanian dari para

anggotanya. Jumlah anggota terdiri atas 20-25 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat, dan usaha ini dipimpin oleh seorang ketua. Ketua kelompok tani mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin rapat anggota kelompok dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA).
- b. Menyampaikan hasil keputusan Rapat Anggota Gapoktan kepada anggota kelompok tani.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan usaha kelompok sesuai hasil keputusan Rapat Anggota Gapoktan.
- d. Menyalurkan dana BLM-PUAP

Penumbuhan/pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau dalam musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok tani dituangkan dalam tata acara pembentukan kelompok tani. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dari anggota oleh seluruh anggotanya.

Fungsi kelompok tani:

- a. Kelas belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap.
- b. Wahana kerja sama: Kelompok taani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani. Melalui kerjasama diharapkan usaha taniannya akan lebih efisien.

- c. Unit Produksi: Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan dipandang satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi.

F. Gambaran Umum Pelaksanaan Program PUAP

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kepemimpinan di pemerintahan, maka kebijakan penguatan modal di bidang pertanian pun ikut berubah dan dimodifikasi lagi agar lebih baik. Pada tahun 2008 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mencanangkan program baru yang diberi nama Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. PNPM - Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Latar belakang dicanangkannya program PNPM Mandiri diawali dari belum tuntasnya penanganan masalah pengangguran di dalam negeri yang kian meningkat. Apalagi ketika terjadi krisis ekonomi yang juga berdampak pada perubahan pada bidang politik dan sosial, sehingga mengakibatkan iklim usaha di dalam negeri terganggu yang berakir pada keputusan para perusahaan merumahkan sebagian besar karyawannya bahkan sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut tentunya berpengaruh pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat yang pada akhirnya bermuara pada meluasnya jumlah kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat di seluruh kementerian atau lembaga. Perlu diketahui juga bahwa program ini bukan merupakan program membagi-bagikan uang, namun pada hakekatnya program ini merupakan program yang bertujuan untuk peningkatan dan penguatan karakter bangsa yang dimulai pada tingkatan kelompok atau masyarakat. Masyarakat melalui kelompok-kelompok tersebut diberikan pelatihan dan pendampingan oleh fasilitator. Pemberdayaan melalui kelompok masyarakat dan bukan melalui individu-individu ditujukan untuk mengembalikan dan menguatkan kembali karakter dasar masyarakat Indonesia yaitu kegotongroyongan sosial dan ekonomi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah telah memberikan bantuan program permodalan, seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Akan tetapi, program pemerintah semacam ini menimbulkan sejumlah masalah moral hazard, karena :

1. Sebagian petani menganggap bahwa program pemerintah bersifat bantuan, sehingga tidak perlu dikembalikan;
2. Sebagian kelompok tani penerima program didirikan secara mendadak, sehingga kurang memiliki pengalaman yang baik;
3. Pembagian dana program yang hanya terbatas pada anggota kelompok tani penerima bantuan.

Fakta ini menunjukkan bahwa pendanaan semacam ini prakteknya sangat membantu, tetapi efektifitasnya perlu kita tunggu dan kita amati terus menerus, dengan pembinaan dan pengawasan yang sustainable oleh komponen baik dari tingkat paling bawah (kelompok tani) sampai tingkat atas (pemerintah).

Pengembangan permodalan dari program ini sangat bervariasi, mulai tahun pertama penyaluran dana sampai dengan sekarang. Banyak kelompok tani yang sudah bisa mengembangkan dana menjadi 2 kali lipat dari bantuan permodalan awal, tetapi masih ada yang berkebutuhan dengan proses pengembalian dana awal bantuan.

Hal ini, disebabkan karena mekanisme pengembalian dana pinjaman anggota ini bervariasi, mulai dari pengembalian harian, mingguan, bulanan, dan jatuh tempo atau bayar panen (yarnen). Pendanaan pada sektor on-farm pengembaliannya relatif lambat karena sebagian besar menggunakan pola yarnen, sedangkan pendanaan pada sektor off-farm relatif lebih cepat dengan pola pengembalian harian, mingguan, dan bulanan.

Berbagai macam mekanisme pengelolaan dana PUAP yang diserahkan pada mekanisme musyawarah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) membuat progres program PUAP ini di masing-masing gapoktan bermacam-macam. Semoga fasilitasi pemerintah menjadikan trigger buat para petani, sehingga petani dan pertanian di Indonesia lebih maju.

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga

tani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan. Gapoktan juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitratani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain:

1. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis
2. Memiliki struktur kepengurusan yang aktif
3. Dimiliki dan dikelola oleh petani
4. Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota.

Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan guna menunjang kegiatan usahanya. Tentunya dalam penyaluran dana tersebut terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan memanfaatkan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan PUAP berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembinaan dan pengendalian di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota.

Tim pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat propinsi dan kabupaten kota dalam bentuk pelatihan. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim pembina propinsi kepada tim teknis kabupaten/kota difokuskan antara lain pada peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM-PUAP ditingkat kabupaten atau kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Selanjutnya pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim teknis kabupaten atau kota kepada tim teknis kecamatan dilakukan dalam format pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan nantinya. Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke propinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian.

Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina PUAP propinsi hingga kepada tim teknis PUAP kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Apabila dalam penyaluran BLM-PUAP berjalan dengan lancar dan di awasi secara optimal dan intensif sehingga pada akhirnya mencapai sasaran yang dituju yakni salah satunya adalah meningkatkan pendapatan petani maka penyaluran bantuan PUAP dapat dikatakan efektif.

a. Tujuan PUAP

Tujuan utama program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berdasarkan pedoman umum PUAP adalah untuk:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

b. Sasaran Program PUAP

Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.
2. Berkembangnya 10.524 Gapoktan atau Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani.
4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan maupun musiman.

c. Sosialisasi PUAP

Sosialisasi merupakan salah satu proses penting untuk penyampaian atau pemberian informasi PUAP kepada masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi masyarakat akan mengetahui serta memahami dengan baik maksud dan tujuan dari program tersebut. Sosialisasi Program PUAP diperlukan dalam beberapa tahapan, baik dari tahap awal sebelum penentuan desa atau gapoktan penerima dana PUAP sampai ke tahap pelaksanaan program PUAP.

Namun untuk tahap awal, waktu yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi ini relatif singkat, yakni hanya 1 bulan. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, pemerintah melalui dekatan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seperti daerah-daerah yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau. Sehingga, berdasarkan pantauan Kompas pada tahun 2008, banyak warga desa yang tidak mengetahui program ini. Ada yang mendengar, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan ke mana mencari informasi, dan ada juga yang baru mendengar setelah proses seleksi ditutup.

Selain itu sosialisasi yang dilakukan aparat tidak menghasilkan pemahaman yang baik bagi petani mengenai program PUAP, berdasarkan kunjungan di lapangan bahwa banyak petani mempunyai pemikiran bahwa PUAP tersebut merupakan dana yang tidak bergulir, sehingga dana tersebut tidak harus dikembalikan kepada Gapoktan. Pemahaman yang keliru tersebut di takutkan akan

memberikan suatu peluang kegagalan program PUAP seperti program-program pemerintah sebelumnya yang sejenis.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dana bantuan (PUAP). Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (*public consultation*), sehingga pemanfaatan dana Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi para kelompok tani dan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di tingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pertanian serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana Bantuan Sosial.

Sosialisasi dana PUAP tersebut diperlukan baik dari tahap awal sebelum penentuan Desa atau Gapoktan Penerima PUAP sampai ke tahap pelaksanaan program PUAP. Sosialisasi dilakukan secara berulang dengan intensitas kunjungan yang lebih tinggi. Para tim sosialisasi, melakukan kunjungan langsung kekelembagaan non-formal, seperti kelompok kesenian, kelompok arisan, kelompok tani, karang taruna, wanita tani, dan kelompok keagamaan (kelompok gereja, pengajian, dan remaja islam masjid) serta ke lembaga formal dengan

memanfaatkan LSM agar sosialisasi tidak terhambat karena keterbatasan penyuluh.

Konsepnya dapat dilakukan dengan mengadakan seni pertunjukan, paduan antara tradisional dan modern yang di dalamnya, terdapat alur cerita yang mengisahkan keuntungan pembentukan gapoktan, kriteria desa dan gapoktan penerima PUAP, konsep dan tujuan PUAP, serta penekanan pada alur pelaksanaan program PUAP.

Setelah proses sosialisasi dilakukan, para tim sosialisasi harus menggali pengetahuan masyarakat petani mengenai informasi yang telah disampaikan dengan memberikan kesempatan tanya jawab serta pemberian reward bagi petani sebagai insentif. Selain tata cara tersebut, para tim sosialisasi juga perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dalam penyampaian materi dan menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami serta tidak menggunakan istilah-istilah asing yang membingungkan masyarakat (disesuaikan dengan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat setempat).

Koordinasi antar instansi yang dilibatkan dalam pelaksanaan program PUAP merupakan salah satu penentu keberhasilan program ini. Untuk itu diperlukan evaluasi, agar pihak-pihak tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peranannya masing-masing. Dalam hal ini Menteri Pertanian, sebagai koordinator diharapkan mampu mengkoordinasikan secara baik seluruh instansi yang terlibat, misalnya dengan menerapkan sistem komunikasi yang efektif antar instansi. Selain itu, dengan membuat semua pihak

merasa bagian dari program ini, dapat dipastikan pihak-pihak tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, tanpa ada yang dipaksakan.

Pendekatan program PUAP hendaknya mengadopsi kombinasi dari dua pendekatan yaitu top-down (berakhir pada masyarakat sasaran petani) dan bottom-up (berawal dan berakhir pada masyarakat sasaran petani hutan). Topdown planning dilaksanakan oleh pembuat keputusan tanpa memahami kondisi penduduk di daerah perencanaan. Rencana ditentukan oleh pejabat lokal dengan arahan-arahan tertentu yang harus diimplementasikan. Bottom-up planning disusun dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses perencanaannya. Masyarakat dalam organisasi pertanian, diikutsertakan dalam penyusunan rencana.

Selain itu, prinsip-prinsip pada tahap yang lebih tinggi, tujuan dan implementasi program harus disatukan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat petani di tingkat lokal. Adapun keuntungan dari pelaksanaan program tersebut adalah program berjalan secara transparan sehingga timbulnya rasa percaya diantara pihak yang terlibat. Selain itu dari sisi masyarakat petani adalah timbulnya rasa memiliki terhadap program PUAP dan mereka memahami secara mendalam mengenai tujuan dari PUAP tersebut. Harapannya, dengan adanya sinergitas dan rasa percaya antar pihak yang terlibat membuat program PUAP bisa terealisasi secara efektif.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Dalam bahagian ini di kemukakan secara singkat tentang keadaan Geografi desa mappatoba, utamanya aspek – aspek geografi yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah tersebut, aspek – aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Secara geografis desa mappatoba yang terletak dengan:

1. Letak dan luas

Desa mappatoba adalah salah satu desa yang terletak dalam wilayah kecamatan salomekko kabupaten bone, yang mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan desa tebba
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan patimpeng
- Sebelah timur berbatasan dengan desa manera
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa malimongeng

Luas desa mappatoba adalah 16,28 km² yang terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun barugae dan dusun jawi – jawi.

2. Keadaan alam dan iklimnya

Kondisi alam desa mappatoba terdiri dari sebagian pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan persawahan yang membentang luas serta tanah datar

untuk rumah – rumah penduduk. Hal seperti ini merupakan salah satu potensi wilayah yang sangat menguntungkan dalam proses pembangunan, karena sangat penting artinya dalam meningkatkan produksi disektor pertanian, maupun dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat dan wilayah tersebut.

B. Keadaan Demografi

Masalah penduduk di desa mappatoba merupakan masalah serius yang ditangani oleh pemerintah desa mappatoba khususnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sumber daya manusianya. Penduduk ini tersebar luas di dalam kampung dengan mata pencaharian utama adalah sebagai petani.

Berdasarkan data dari kantor desa tahun 2012 diperoleh jawaban bahwa jumlah penduduk desa mappatoba sebanyak 1368 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat lebih didominasi oleh perempuan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Komposisi Penduduk Desa Mappatoba
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Dusun	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
		Laki – Laki	Perempuan
1.	Baruga	317	307
2.	Jawi – jawi	358	386
	Jumlah	675	693

Sumber : kantor desa mappatoba, tahun 2012

sedangkan untuk mengetahui keadaan penduduk dilihat dari pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Keadaan Penduduk Dilihat Dari Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah jiwa
1.	Tidak sekolah / tidak tamat SD	474
2.	Tamat sekolah dasar	362
3.	Tamat SMP	135
4.	Tamat SMA	112
5.	Akademi perguruan tinggi	285
Jumlah		1368

Sumber: Kantor Desa Mappatoba 2012

C. Potensi Wilayah

1. Pertanian

Penduduk desa mappatoba sebagian besar bergantung pada sector pertanian karena struktur tanah di desa mappatoba baik untuk berbagai jenis tanaman. Areal tanah tersebut diperuntukkan untuk berbagai jenis tanaman jangka pendek maupun panjang. Adapun jenis – jenis tanaman adalah :

1. Jenis tanaman pertanian musiman yaitu: padi, jagung, kacang – kacang dan lain – lain.
2. Jenis tanaman pertanian tahunan yaitu: kelapa, coklat dan lain – lain.
3. Jenis tanaman pertanian pekarangan seperti : sayur – sayuran, Lombok, tomat, timun, terong, lengkuas dan lain – lain.

2. Peternakan

Disamping pertanian, sektor peternakan juga merupakan salah satu usaha bagi penduduk di desa mappatoba yang sangat menunjang pembangunan social ekonomi dan erat hubungannya dengan sector pertanian, dimana ternak sapi dapat digunakan sebagai tenaga inti dalam mengolah pertanian, meskipun dewasa ini sudah banyak peralatan yang lebih modern. Jenis ternak yang ada di desa mappatoba adalah sapi, kerbau, kambing dan unggas.

D. Struktur Organisasi

Mengetahui secara mendalam suatu organisasi tidak hanya mengenal prinsip ataukah cirinya saja tetapi yang lebih penting dan juga sekaligus pemahaman kita terhadap organisasi yang bersangkutan secara lebih luas dan mengenal srtuktur organisasinya, karena dengan demikian dapat diketahui sejauh mana peranan dan hubungan satuan – satuan yang ada dalam organisasi atau dapat dianggap sebagai kerangka dasar menyeluruh yang mempersatukan fungsi –

fungsi suatu organisasi dan menetapkan hubungan defenisi antara personil yang melaksanakan fungsi tersebut.

Pada hakekatnya struktur organisasi merupakan sekelompok manusia yang dengan sengaja dipersatukan dalam suatu kerja sama yang efesien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manusia sebagai anggota organisasi tadi masing – masing tentu mempunyai tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang ingi dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Mereka melakukan semua itu harus dalam suatu forum pembagian kerja, pembagian waktu dan koordinasi yang setepat – tepatnya sehingga terhindar dari pemborosan – pemborosan dan kemacetan – kemacetan.

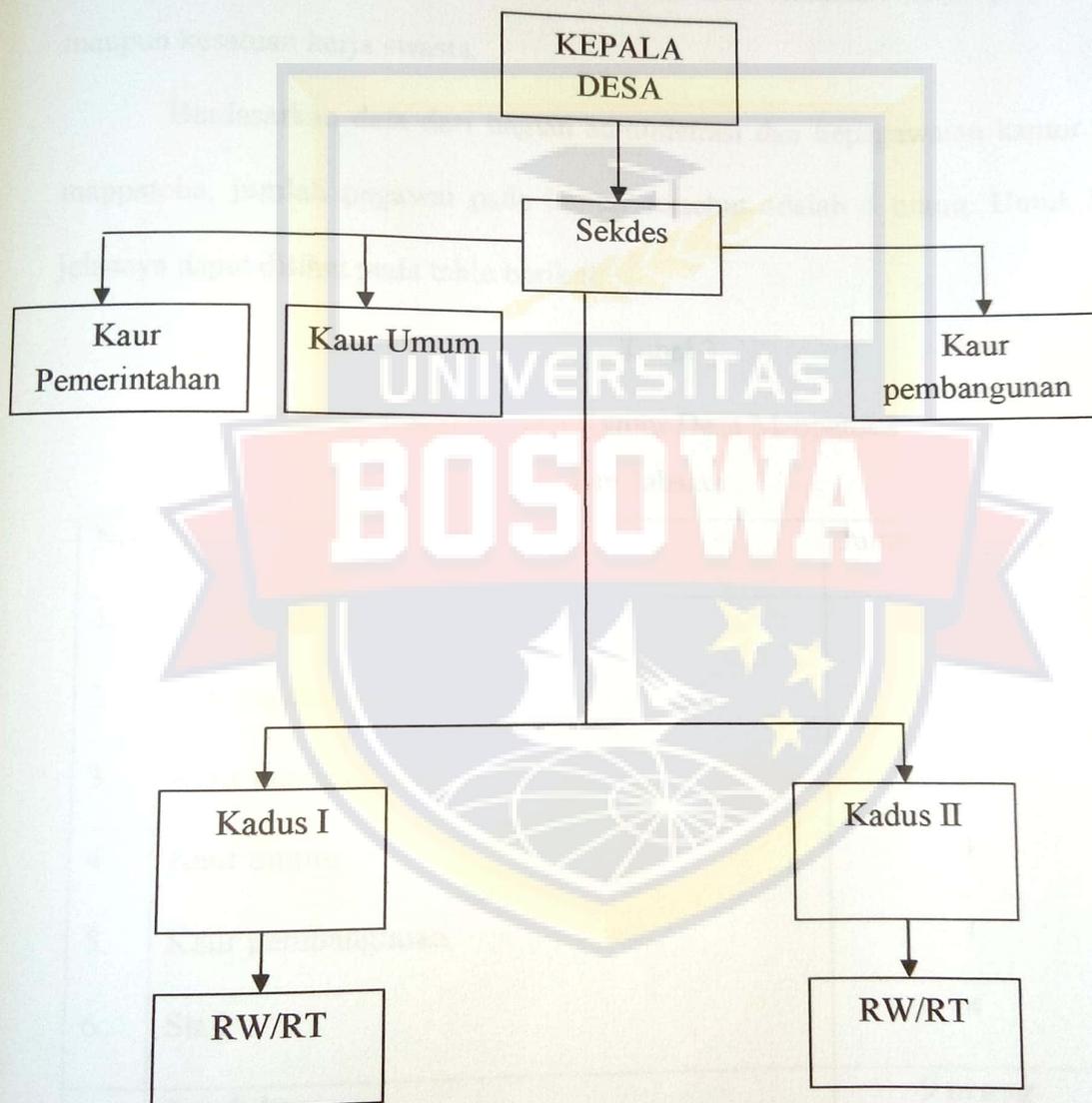
Struktur organisasi ini disusun dalam bentuk sederhana dan frekuensi yang dalam polanya telah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga dengan demikian dapat disesuaikan dengan luasnya tugas – tugas yang akan dilaksanakan dan dianggap perlu diadakan perubahab sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan.

Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam mengklasifikasikan tugas – tugas yang dijalankan oleh setiap anggota organisasi dapat dijalankan oleh setiap anggota organisasi sesuai dengan pekerjaan yang dibebankannya.

Dengan adanya struktur organisasi sebagai pola hubungan formal yang dapat menimbulkan kecenderungan pada setiap anggota untuk menempatkan posisi dimana ada sebagai atasan dan kelompok orang sebagai bawahan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, pemerintahan desa mappatoba menetapkan struktur organisasi desa mappatoba sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Desa Mappatoba



E. Komposisi Pegawai

1. Berdasarkan Jumlah Pegawai

Pegawai adalah golongan masyarakat yang melakukan kehidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah, maupun kesatuan kerja swasta.

Berdasarkan data dari bagian administrasi dan kepegawaian kantor desa mappatoba, jumlah pegawai pada kantor tersebut adalah 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3

Jumlah Pegawai pada Kantor Desa Mappatoba
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris desa	1
3.	Kaur Pemerintahan	1
4.	Kaur umum	1
5.	Kaur pembangunan	1
6.	Staf	4
	Jumlah	9 orang

Sumber : kantor desa mappatoba 2012

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pegawai yang ada dikantor desa mappatoba dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4
Komposisi pegawai kantor desa mappatoba
menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki – laki	6 orang	66,67
2.	Perempuan	3 orang	33,33
Jumlah		9 orang	100%

Sumber: kantor desa mappatoba 2012

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Departemen Pertanian telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebagai dana stimulan yang dialokasikan untuk pembelian sarana produksi kegiatan pertanian yang meliputi pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya serta juga digunakan untuk simpan pinjam. serta berkembangnya PUAP sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. PUAP juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani pemilik tanah, petani penggarap, buruh tani dan berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kepentingan dan kebersamaan dalam kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), serta kesepakatan dalam meningkatkan usaha pertanian dari para anggotanya.

Fungsi kelompok tani:

- a. Kelas belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap.

- b. Wahana kerja sama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani. Melalui kerjasama diharapkan usahanya akan lebih efisien.
- c. Unit Produksi: Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan dipandang satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi.

Desa Mappatoba merupakan salah satu dari beberapa desa di kecamatan Salomekko yang sudah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Mata pencaharian utama penduduk desa berada pada sektor pertanian dengan komoditas utama di desa ini adalah tanaman pangan dan hortikultura yaitu padi, kacang tanah dan jagung yang mereka tanam secara bergiliran, begitu tanaman padi kemudian mereka ganti dengan kacang tanah dan jagung kemudian seterusnya.

Di desa ini hanya terdapat satu Gapoktan yang diberi nama "jawi - jawi" yang terdiri dari 8 kelompok tani yang masing - masing anggotanya terdiri dari 25 orang yaitu kelompok tani Mawar, Tani Jaya, Murni, barugae, mappasitujue, sederhana, makmur, bulu-bulue. Kelompok tani ini dipimpin oleh penyuluh pendamping.

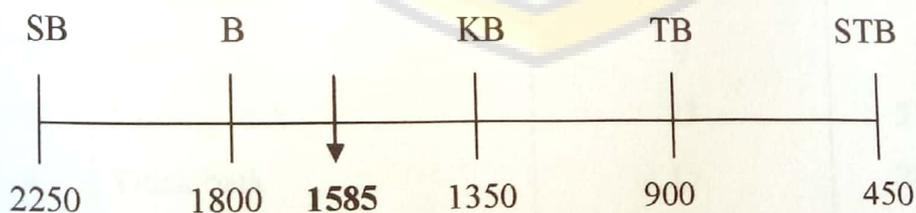
Program PUAP merupakan sebuah program pemerintah pada tahun 2008 namun program ini berjalan pada tahun 2009 di desa mappatoba yang merupakan salah satu bagian dari kompensasi pengentasan kemiskinan yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sasarannya adalah rumah

tangga miskin dan yang tergabung dalam kelompok tani. Penelitian mengenai pelaksanaan program dana bantuan kelompok tani disusun atas 2 variabel penelitian yaitu proses pelaksanaan penyaluran dan dampak pelaksanaan program dana bantuan kelompok tani di desa mappatoba. maka hasil yang diperoleh mengenai masing-masing variabel tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Pelaksanaan Program PUAP di Desa Mappatoba

Dalam penilaian ini dilihat dari persepsi masyarakat terhadap prosedur pelaksanaan program PUAP di desa mappatoba dapat dilihat pada hasil kuesioner penelitian terlampir pada lampiran 1. Dari 45 responden yang ditanyakan melalui angket kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah skor pada prosedur pelaksanaan program dana bantuan kelompok tani sangat baik bila memperoleh skor $45 \times 5 \times 10 = 2250$ sedangkan nilai terburuk adalah $45 \times 1 \times 10 = 450$. Sedangkan skor total yang diperoleh dalam tabel penelitian dilapangan hasilnya sebesar = 1585, Bila digambarkan dalam skala kontinu diperoleh sebagai berikut:



Ternyata skor 1565 termasuk kategori antara interval baik dan kurang baik tetapi lebih mendekati baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan penyaluran dana bantuan kelompok tani di desa mappatoba

tersebut diatas berada dalam kategori baik. Kebijakan ini sangatlah sistematis dan sangat terorganisir maka wajar jika dikatakan program ini sangat menguntungkan masyarakat pra sejahtera dalam pelaksanaannya dilapangan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu proses penting untuk penyampaian atau pemberian informasi PUAP kepada masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi masyarakat akan mengetahui serta memahami dengan baik maksud dan tujuan dari program tersebut. Sosialisasi program PUAP diperlukan dalam beberapa tahapan, baik dari tahap awal sebelum penentuan desa atau gapoktan penerima dana PUAP sampai ke tahap pelaksanaan program PUAP.

Tabel 5

Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi dalam Pelaksanaan Program PUAP

No	Kategori Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	-	-
2	baik	9	20
3	Kurang baik	23	51.11
4	Tidak baik	13	28.89
5	Sangat Tidak baik	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner April 2012

Berdasarkan tabel 5 di atas tanggapan responden tentang sosialisasi dalam pelaksanaan program PUAP masih kurang baik. Responden yang memberikan jawaban ini sebanyak 23 orang atau 51,11%, dengan alasan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak menghasilkan pemahaman yang baik bagi para petani mengenai program PUAP, berdasarkan kunjungan di lapangan bahwa banyak petani mempunyai pemikiran bahwa program PUAP tersebut merupakan dana yang tidak bergulir, sehingga dana tersebut tidak harus dikembalikan kepada Gapoktan. Pemahaman yang keliru tersebut di takutkan akan memberikan suatu peluang kegagalan program PUAP seperti program-program pemerintah sebelumnya yang sejenis.

Menurut salah satu informan yang saya wawancarai bahwa: "seharusnya sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dana bantuan (PUAP). Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public consultation), sehingga pemanfaatan dana Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi para kelompok tani dan masyarakat pada umumnya". (hasil wawancara 22 maret 2012)

2. Penyaluran

Penyaluran dana bantuan-PUAP bagi para petani harus mengutamakan pelayanan yang baik. Pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana bantuan

tersebut dapat menjangkau para petani yang membutuhkan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola pelayanan penyaluran dana bantuan-PUAP yang diinginkan oleh kelompok sasaran tersebut sehingga penyalurannya efektif menurut petani pengguna. Efektivitas penyaluran dari sisi pengguna (petani) dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut yaitu persyaratan awal, prosedur realisasi pinjaman, tingkat bunga, biaya administrasi, pelayanan dan jarak atau lokasi.

a. Persyaratan Awal

Pengajuan permohonan pinjaman oleh petani dapat diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Adapun secara umum persyaratan tersebut adalah calon peminjam benar-benar merupakan petani, petani penggarap atau rumah tangga tani yang tergabung dalam kelompok tani dan Gapoktan aktif di desanya. Selain itu, calon peminjam yang akan mengajukan permohonan pinjaman harus melengkapi beberapa ketentuan administratif antara lain: foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan photo ukuran 2X3 sebanyak dua lembar; menandatangani surat perjanjian di atas materai, menandatangani kwitansi diatas materai, serta mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman.

b. Prosedur Pinjaman

Prosedur pinjaman merupakan tahapan yang harus dilalui mulai dari pertama kali mengajukan suatu pinjaman hingga pada tahap realisasi pinjaman tersebut diperoleh peminjam. Prosedur dalam peminjaman dana bantuan-PUAP

dimulai dari tahap dimana para anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan harus menyusun Rencana Usaha Anggota (RUA) yang kemudian disusul dengan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK). Dalam penyusunan RUA dan RUK akan dibantu oleh PPL. RUK yang telah disetujui oleh ketua kelompok tani dan PPL selanjutnya disampaikan langsung kepada pengurus Gapoktan. Rencana Usaha Kelompok (RUK) kemudian akan diproses oleh pengurus Gapoktan. Proses penilaian tersebut meliputi kelengkapan secara administratif.

Setelah disetujui oleh pengurus Gapoktan maka ketua kelompok tani diberikan suatu kewenangan dan kepercayaan untuk menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada anggotanya sesuai dengan RUA masing-masing anggota.

c. Realisasi Pinjaman

Lama realisasi kredit sejak pengajuan sampai pemberian pinjaman cukup bervariasi. Lama realisasi pinjaman juga tidak ditentukan oleh pengurus Gapoktan, namun semua itu tergantung dari waktu RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang diajukan oleh ketua kelompok tani kepada pengurus Gapoktan hingga akad pinjaman ditandatangani oleh kelompok tani bersama dengan pengurus yang juga diketahui oleh PPL sebagai pendamping. Pada awal penyaluran dana bantuan-PUAP para anggota yang meminjam dana tersebut ke Gapoktan masing-masing hanya memerlukan waktu dua sampai tiga hari sejak pengajuan sampai pinjaman tersebut cair.

d. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan mencakup materai, foto copy bahan tertentu dan sebagainya. Biaya ini digunakan untuk mengganti biaya-biaya langsung dalam proses peminjaman. Besarnya biaya administrasi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat di Gapoktan.

e. Tingkat Bunga

Tingkat Bunga adalah bunga nominal dalam persen yang harus dibayar peminjam berdasarkan perjanjiannya dengan yang meminjamkan. Tingkat bunga yang dibebankan kepada petani sebagai peminjam sangat bervariasi tergantung dari masing-masing kebijakan pengurus Gapoktannya. Besarnya tingkat bunga di desa yang diteliti berkisar antara 0.5%-5%. Bila dibandingkan dengan bunga pinjaman di lembaga keuangan formal maupun non formal lainnya, besarnya tingkat bunga pengguna dana PUAP termasuk relatif ringan.

f. Pelayanan

Pelayanan dalam kegiatan simpan pinjam dimulai dari proses permohonan pinjaman hingga pada pengembalian pinjaman itu sendiri. Dalam hal ini pelayanan yang dinilai meliputi kemampuan pengurus mensosialisasikan dan menjelaskan mengenai program dana bantuan-PUAP serta hal-hal lain yang terkait dengan program tersebut.

Pelaksanaan penyaluran program dana bantuan-PUAP sangatlah bermanfaat terhadap perekonomian mikro terutama masyarakat pra sejahtera yakni masyarakat miskin dan masyarakat dibawah garis kemiskinan.

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap pelaksanaan
penyaluran dana bantuan kelompok tani

No	Kategori Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	10	22.22
2	baik	26	57.78
3	Kurang baik	9	20
4	Tidak baik	-	-
5	Sangat Tidak baik	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner April 2012

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa kegiatan pelaksanaan penyaluran dana bantuan-PUAP yang diselenggarakan di desa mappatoba dikategorikan baik. Hal ini didasari dari responden yang memberikan kategori jawaban baik sebanyak 26 orang atau 57.78%, dengan alasan bahwa pada pelaksanaan penyaluran dana bantuan-PUAP dapat memberikan manfaat yang cukup besar, karena mereka akan terhindar dengan pengeluaran yang besar, yaitu mereka yang selama ini tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan salah satu informan bahwa:

“ keefektifan penyaluran dana bantuan-PUAP di Gapoktan ditunjukkan dari hasil nilai persentase tanggapan yang tidak ada sama sekali. Selain itu juga dinilai dari tingkat bunga yang relatif kecil bila dibandingkan

dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut yang membuat para petani termotivasi untuk melakukan peminjaman kepada pengurus Gapoktan". (hasil wawancara 22 maret 2012)

3. Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan untuk mengadakan pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan agar benar – benar mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu rencana. Jadi dengan demikian pengawasan itu tidak hanya mencari kesalahan semata – mata, tetapi lebih ditujukan untuk membantu kelancaran dan suksesnya pelaksanaan dan tidak memacetkan pelaksanaan.

Tabel 7

Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Pemerintah Desa
Dalam Pelaksanaan Program PUAP

No	Kategori Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	-	-
2	baik	22	48.89
3	Kurang baik	23	51.11
4	Tidak baik	-	-
5	Sangat Tidak baik	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner April 2012

Dari tabel 7 di atas menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan program PUAP dikategorikan kurang baik. Hal ini didasari dari responden yang memberikan kategori jawaban kurang baik sebanyak 23

orang atau 51.11% dengan alasan bahwa apabila pengawasan tidak dilaksanakan kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Jadi disini pengawasan dari pemerintah sangat mempengaruhi lancarnya program PUAP.

4. Evaluasi

evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kegiatan pekerjaan atau untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu pekerjaan dilakukan seseorang.

Tabel 8
Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi
Pelaksanaan Program PUAP

No	Kategori Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	-	-
2	baik	29	64.44
3	Kurang baik	16	35.56
4	Tidak baik	-	-
5	Sangat Tidak baik	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner April 2012

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa evaluasi program PUAP di desa mappatoba dikategorikan baik. Hal ini didasari dari responden yang memberikan kategori jawaban baik sebanyak 29 orang atau 64.44%. Evaluasi pelaksanaan program PUAP untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai atau berhasil berdasarkan indikator - indikator yang ada. Keberhasilan

program PUAP akan memberikan dampak berupa manfaat yang optimal. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan program ini sangat diperlukan untuk menilai indikator – indikator keberhasilan PUAP yaitu mulai dari tersalurkannya dana PUAP kepada petani dan menilai peningkatan pendapatan petani.

B. Dampak Dana Bantuan-PUAP Terhadap Kelompok Tani

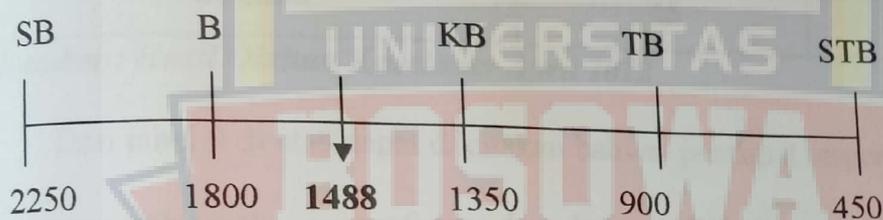
Suatu program akan menjadi sarana yang baik apabila dilakukan dengan tepat, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat perencanaan maupun tepat prosedur. Hal tersebut senada dengan program PUAP sendiri yang mengedepankan pelaksanaan yang efektif. Efektif dalam arti diberikan pada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pemanfaatannya pun tepat. Apabila pemberian dana tersebut tidak tepat pada sasarannya maka akan berdampak negatif bagi keberlanjutan program tersebut. Selain dinilai dari ketepatan dalam sasaran, pelaksanaan program PUAP juga dinilai dari ketepatan pemanfaatan dana tersebut.

Anggota Gapoktan memperoleh pinjaman PUAP dalam jumlah yang relatif sama dengan yang diajukan dalam RUK atau RUA. Selanjutnya pemanfaatan pinjaman tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing anggota selaku peminjam. Berdasarkan pengamatan, para petani yang memperoleh pinjaman sebagian besar memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal usaha taninya.

Dalam penilaian ini dilihat dari persepsi masyarakat terhadap dampak dana bantuan-PUAP kelompok tani di desa mappatoba dapat dilihat pada hasil

kuesioner penelitian terlampir pada lampiran 2. Dari 45 responden yang ditanyakan melalui angket kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah skor pada dampak dana bantuan kelompok tani di desa mappatoba sangat baik bila memperoleh skor $45 \times 5 \times 10 = 2250$ sedangkan nilai terburuk adalah $45 \times 1 \times 10 = 450$. Sedangkan skor total yang diperoleh dalam tabel penelitian dilapangan hasilnya sebesar = 1488, Bila digambarkan dalam skala kontinun diperoleh sebagai berikut:



Ternyata skor 1488 termasuk kategori antara interval baik dan kurang baik tetapi lebih mendekati baik dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak dana bantuan kelompok tani di desa mappatoba tersebut diatas berada dalam kategori baik.

Sekalipun demikian hal yang masih menjadi masalah adalah: dampak pemanfaatan dana bantuan-PUAP., seperti tabel berikut:

Tabel 9
Tanggapan Responden Terhadap dampak
pemanfaatan dana bantuan-PUAP

No	Kategori Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	9	20
2	baik	25	55.56
3	Kurang baik	11	24.44
4	Tidak baik	-	-
5	Sangat Tidak baik	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner April 2012

Dari tabel 9 di atas dapat dikatakan bahwa pendapat responden sebagian besar menjawab tingkat pemanfaatan dana bantuan-PUAP sangatlah berpengaruh besar kepada penghasilan masyarakat atau dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari 45 responden, 9 responden atau 20% mengatakan baik, 25 responden 55.56% mengatakan baik, dan 11 responden 24.44% mengatakan kurang baik.

Menurut responden yang telah diwawancarai mengatakan bahwa:

“dana bantuan-PUAP pemanfaatannya sangat banyak, salah satunya pinjaman sepenuhnya digunakan untuk menambah modal usaha seperti membeli pupuk, obat-obatan dan biaya transportasi”. (wawancara 22 maret 2012).

Berikut akan dikemukakan penilaian responden mengenai tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya program dana bantuan-PUAP.

Tabel 10
Penilaian Responden Terhadap Tingkat Pendapatan
Petani Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Bantuan

No	Kategori Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat baik	-	-
2	baik	32	71.11
3	Kurang baik	13	28.89
4	Tidak baik	-	-
5	Sangat Tidak baik	-	-
Jumlah		45	100

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner April 2012

Dari tabel 10 di atas dapat dikatakan bahwa pendapat responden bahwa sebagian besar menjawab tingkat pendapatan petani meningkat walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pendapatan secara positif atau dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari 45 responden, 32 responden atau 71.11% mengatakan bahwa tingkat pendapatan petani relative baik, dan 13 responden atau 28.89% mengatakan tingkat pendapatan petani kurang baik. Salah satu tujuan utama yang terkait dengan pelaksanaan program PUAP adalah peningkatan kesejahteraan petani yang dinilai dari peningkatan pendapatan petani.

Menurut salah satu responden yang telah diwawancarai bahwa: “dengan adanya Dana Bantuan-PUAP mempermudah kami untuk membeli sarana produksi (saprodi) agar ketepatan waktu dalam memberikan pupuk, obat-obatan dan sebagainya dapat terlaksana dengan baik sehingga hasil akhir yang diperoleh pada saat panen ialah dapat meningkat baik kualitas maupun kuantitas produksi padi tersebut”.

Peningkatan hasil produksi padi tentunya mendatangkan keuntungan, minimal para petani tidak lagi membeli beras ke pasar karena tersedia stok beras yang cukup, maksimalnya adalah pendapatan mereka dapat meningkat sehingga pada akhirnya diharapkan kesejahteraan mereka pun meningkat. Walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pendapatan secara positif atau mengalami peningkatan yang masih kecil, namun hal tersebut tidak mempengaruhi para responden dalam membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Kemampuan para petani penerima dana bantuan-PUAP dalam mengembalikan angsuran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan usaha dan keluarga.

Walaupun mereka belum bisa membuat pembukuan secara mendetail dan teratur. Namun hal tersebut merupakan potensi yang perlu ditingkatkan dan dijadikan dasar agar program PUAP dimasa mendatang dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Kedepan pengurus Gapoktan dan penyuluh pertanian juga harus menegaskan kembali kepada para petani atau anggota Gapoktan bahwa program dana bantuan-PUAP bukanlah program amal atau bantuan yang terkesan bagi-

bagi uang. Persepsi para petani harus mampu diubah dari pemikiran yang menganggap bahwa mereka adalah objek yang harus dikasihani ke arah pemikiran yang membuat mereka termotivasi untuk menjadi petani mandiri dan sejahtera.

Meninjau hal-hal yang telah diuraikan di atas, perlu dipertimbangkan pula peran dari para penyuluh pertanian lapangan sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Pertimbangan pentingnya penyuluh pendamping perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusianya adalah karena penyuluh pendamping memiliki peran penting dalam menghubungkan dan mentransfer baik ilmu, teknologi baru hingga pada pemberian pelatihan guna meningkatkan keterampilan para petani. Selain itu dengan adanya penyuluh pertanian pendamping yang ditempatkan di tiap desa atau Gapoktan akan memberikan efek positif terhadap perkembangan Gapoktan sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan Pelaksanaan Program dana bantuan-PUAP di desa mappatoba berjalan dengan baik . hal ini dapat dikatakan sudah efektif karena tiga dari kriteria efektifitas penyaluran telah memenuhi kategori efektif (persentase tunggakan, tingkat bunga dan jangkauan pinjaman). Namun tentunya masih terdapat kekurangan – kekurangan adanya isu mengenai penyimpangan dana PUAP dikarenakan pandangan para petani bahwa program dana bantuan-PUAP merupakan program bagi-bagi uang. Akan tetapi kenyataannya bantuan itu berupa pinjaman.

Dampak pelaksanaan dana bantuan kelompok tani di desa mappatoba Mayoritas responden petani menggunakan dana bantuan-PUAP untuk menambah modal usahanya. Sebagian besar responden menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat dari pinjaman tersebut. Ratarata pendapatan para petani sebelum dan setelah menerima dana bantuan-PUAP mengalami perubahan peningkatan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil panen terhadap perubahan pendapatan yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari pendapatan responden petani sebelum dan setelah adanya PUAP.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dana bantuan kelompok tani di masa yang akan datang penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan, sebagai berikut:

1. Perlunya pembuatan pedoman umum mengenai program secara menyeluruh untuk menjadi acuan tentang pelaksanaan program dana bantuan-PUAP.
2. Perlunya diadakan sosialisasi, sehingga program ini jelas di masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, karna banyak sebagian masyarakat yang menerima bantuan, mengira bantuan yang diberikan secara Cuma-Cuma padahal dana tersebut harus di kembalikan secara berkala namun rendah . Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan bersama.
3. Perlunya aparat desa berkoordinasi dengan toko toko masyarakat yang ada di Desa Mappatoba sehingga mendapat dukungan dari masyarakat agar program ini dapat berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukur. 1987. *Bunga Rampai Administrasi*. Fakultas Isipol. Ujung Pandang.

AbdulWahab, Solichin. 1997. *Perumusan Kebijakan Negara*. Malang : Rineka Cipta.

Departemen Pertanian. 2008. *Peraturan Menteri Pertanian No.16/OT.140/2/2008*. Jakarta: Departemen Pertanian RI.

Hartono R. 2003. skripsi : *Dampak Dana Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Sleman*.

Siagian, Sondang P. 1994. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Soedjadi, FX . 1994. *Organisasi dan Methods*. Jakarta : Agung.

Sutarto. 1995. *Dasar – Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Tjokroamidjojo, Bintoro, MA. 1996. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Dharma Aksara.

Wajong, J. 1990. *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta : Djambatan .

Internet :

<http://www.jabarkita.com>. 2011/04. Subang. **Targetkan seluruh desa dapat bantuan puap**. Diakses Tanggal 2 Maret 2012 pukul 19.00 WITA.

Prakoso Bhairawa Putera S, Prakoso, 2008, **Memberdayakan Masyarakat Miskin**.

. Diakses tanggal 12 maret 2012 pukul 15.00

WITA

Dalam rangka Penelitian tugas akhir dengan dimohon kiranya Bapak/Ibu Sdr (i) meluangkan waktunya sejenak untuk memberikan data dengan menjawab pernyataan berikut secara objektif pada kuesioner ini, kerahasiaan identitas dan hasil penelitian ini dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan sumbangan pemikiran kita semua . Terima kasih.

Questioner penelitian:

A. Pelaksanaan program PUAP di desa mappatoba

1. Bagaimana tanggapan saudara (i) dengan adanya program PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. tidak baik
 - e. sangat tidak baik

2. Bagaimana tanggapan saudara (i) tentang prosedur pelaksanaan penyaluran dana bantuan PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

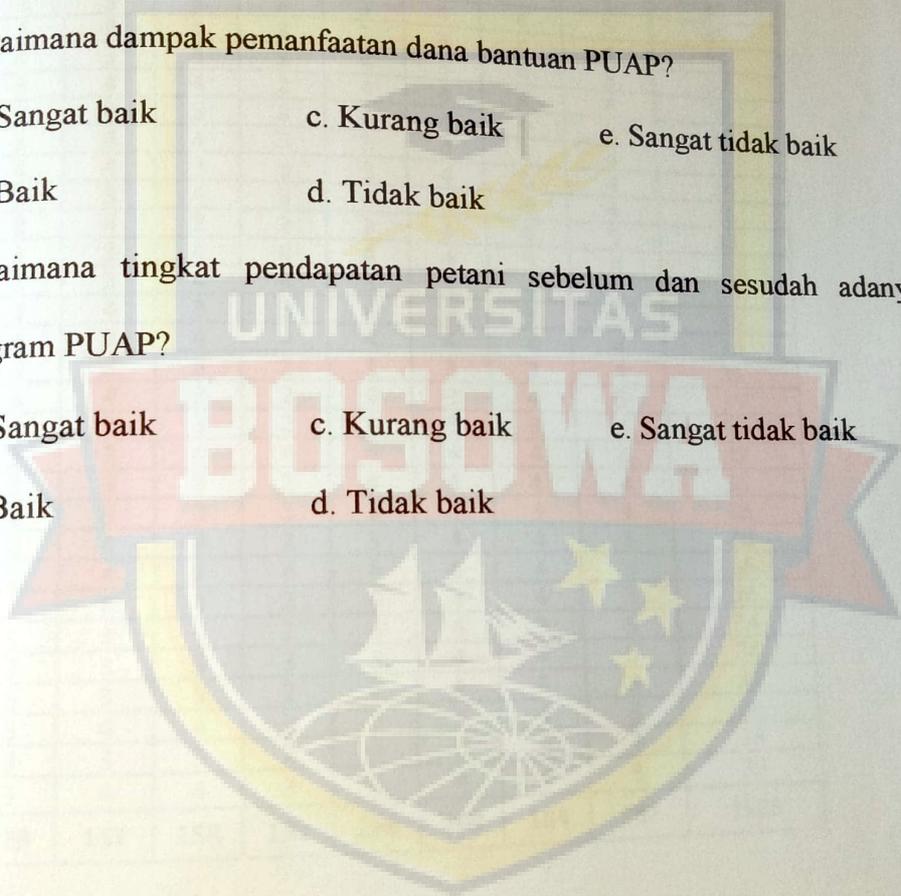
3. Bagaiman tanggapan anda terhadap tujuan program PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

4. Bagaimana pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

B. dampak pelaksanaan program PUAP di desa mappatoba

1. bagaimana pendapat anda tentang dampak pelaksanaan program dana bantuan kelompok tani?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
2. Bagaimana pengaruh program PUAP terhadap kelompok tani?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
3. Menurut anda bagaimana dampak pelaksanaan program PUAP di desa mappatoba?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
4. Bagaimana hasil dari kegiatan program PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. sangat tidak baik
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap kehadiran program PUAP?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik

7. Bagaimana tanggapan anda tentang penggunaan program PUAP?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
8. Bagaimana dampak penyaluran dana bantuan PUAP?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
9. Bagaimana dampak pemanfaatan dana bantuan PUAP?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
10. Bagaimana tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya program PUAP?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik



LAMPIRAN 2

PERSEPSI 45 RESPONDEN DAMPAK DANA BANTUAN KELOMPOK TANI DI DESA MAPPATOBA KEC. SALOMEKKO KAB. BONE

NO. RESPONDEN	JAWABAN RESPONDEN										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	3	3	4	4	3	3	2	2	2	30
2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	32
3	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3	32
4	4	4	2	3	4	4	4	3	3	3	34
5	4	3	2	3	4	3	4	2	3	3	31
6	4	4	2	3	4	4	3	2	3	3	32
7	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	31
8	4	3	2	4	4	4	4	2	3	3	27
9	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	32
10	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	32
11	3	3	2	4	4	3	4	2	3	3	32
12	4	3	2	3	3	3	4	3	2	3	31
13	4	4	2	2	4	4	3	3	3	3	30
14	3	3	2	3	4	3	4	2	2	2	29
15	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	30
16	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31
17	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32
18	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	32
19	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	32
20	4	3	3	3	4	4	4	4	2	3	33
21	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	31
22	4	3	2	3	4	3	3	3	2	3	30
23	4	4	3	4	4	4	3	3	2	3	34
24	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	33
25	4	3	4	2	4	3	3	2	3	3	31
26	4	2	4	4	4	4	3	4	3	3	34
27	3	4	3	4	3	3	4	2	3	3	32
28	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	33
29	3	2	4	4	4	4	4	2	2	3	32
30	4	3	3	3	4	3	3	2	2	3	30
31	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	33
32	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	32
33	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3	32
34	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	34
35	4	4	3	3	3	4	4	2	2	2	31
36	4	3	3	3	4	3	4	2	2	3	31
37	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	31
38	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	33
39	4	2	2	3	3	4	4	3	2	3	30
40	4	3	2	3	4	4	4	2	3	3	32
41	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	31
42	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	31
43	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	31
44	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	35
45	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	31
46	4	3	2	3	4	3	3	2	2	3	31
47	3	4	3	4	4	3	3	2	2	3	31
JUMLAH	169	147	121	143	169	156	153	115	123	132	1478

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Rabu, Tanggal Dua Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas Skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”**

Nama : **Sumiati**
Nomor Stambuk : **4508021030**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Negara (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum;

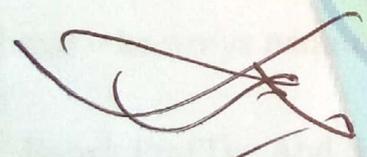


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH.,MH.
Rektor Universitas “45”



Dra. Hj. Juharni, M.Si.
Dekan FISIP. Universitas “45”

Panitia Ujian;



Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd.
Ketua



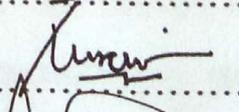
Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.
Sekretaris

TIM Penguji;

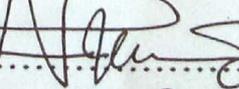
1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
2. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
3. Dra. Nurkaidah, MM
4. Drs. Udin B. Sore, SH., M.Si



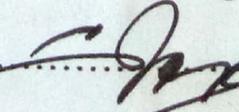
(.....)



(.....)



(.....)



(.....)